



SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEPAKARAN INTERNAL FISIP UNIVERSITAS PASUNDAN

No. : 19 /FISIP-UNPAS/P3M/SPP-Pen/I/2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan yang berkedudukan di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung dan selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Dr. Iwan Satibi, M.Si** : Bertindak selaku Ketua Tim Peneliti dan Tenaga Pendidik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan yang berkedudukan di Jl. Lengkong Besar No. 68, yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Surat Edaran Dirjen DIkti No. 049/E.3/LT/2017 tentang Edaran Tindak Lanjut hasil seleksi Program Penelitian;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 205/Unpas.R/SK/C/XII/2018, tentang Pemberhentian dari Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan, masa bakti 2018-2022.
4. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan No. 340/Unpas-FISIP.D/SK/XII/2019 tentang Penetapan Penerima Dana Kepakaran Internal Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2019/2020.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kepakaran Internal Penugasan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Penelitian yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dengan judul "**Konstruksi Konsep Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam**

Pengadaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat)”

- 2) **PIHAK KEDUA**, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana di maksud dalam ayat (1)
- 3) Pelaksanaan Kepakaran Internal Penugasan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) judul yang berdasarkan data yang diusulkan dan tidak dibiayai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

PASAL 2

- 1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana kepakaran internal untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 1 sebesar Rp. **10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH)** yang dibebankan kepada anggaran keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2019/2020;
- 2) Dana Kepakaran Internal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **PIHAK PERTAMA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pembayaran tahap pertama sebesar 50% (**LIMA PULUH PERSEN**) atau setara dengan nilai Rp. 5.000.000 (**LIMA JUTA RUPIAH**) dibayarkan setelah perjanjian di tandatangani oleh kedua belah pihak;
 - (b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (**TIGA PULUH PERSEN**) atau setara dengan nilai Rp. 3.000.000 (**TIGA JUTA RUPIAH**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen Laporan Akhir Penelitian Program Kepakaran Internal Penelitian dan telah mempresentasikan pada Seminar Hasil yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) bulan April 2021.
 - (c) Pembayaran tahap ketiga sebesar 20% (**DUA PULUH PERSEN**) atau setara dengan nilai Rp. 2.000.000 (**DUA JUTA RUPIAH**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen Laporan Akhir yang sudah di perbaiki dan Letter Submitted melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) pada Bulan Juni 2021
 - (d) **PIHAK PERTAMA** wajib menyimpan seluruh Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan, Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan.
 - (e) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- 1) **PIHAK KEDUA**, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan Penelitian;
- 2) **PIHAK KEDUA**, bertanggungjawab penuh atas data administrasi peneliti penerima dana kepakaran internal;
- 3) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban menindaklanjuti hasil penelitian untuk dipublikasikan minimal di Jurnal Nasional tidak terakreditasi dan mengupayakan perolehan/pendaftaran hak kekayaan intelektual dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional terindeks scopus dan/atau teknologi tepat guna dan/atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana di maksud Pasal 1 ayat (2);
- 4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- 5) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban melampirkan melaporkan perkembangan perolehan hak kekayaan intelektual dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa social dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) pada Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

PASAL 4

- 1) Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan sah setelah di validasi oleh Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M).
- 2) **PIHAK KEDUA**, harus menyerahkan 1 (satu) eksemplar "*hardcopy*"nya kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) FISIP-UNPAS, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada Juni 2021.
- 3) Apabila batas waktu penyerahan laporan-lapoan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini terlewati dan **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan kewajiban pelaporannya secara lengkap kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berdasarkan keputusan rapat Dekanat dan ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) FISIP-UNPAS;
- 4) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun berikutnya;
- 5) Laporan hasil bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A-4;
 - b. Warna sampul disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. Dibagian sampul di tulis: Dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

PASAL 5

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- 2) Apabila ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang setara sesuai bidang ilmu dan merupakan salah satu anggota tim;
- 3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke kas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

PASAL 6

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- 3) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kepakaran Internal FISIP Universitas Pasundan ini dibuat 2 (dua) rangkap, dan keduanya bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Dekan FISIP Unpas

Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Peneliti,

Dr. Iwan Satibi, M.Si



PROPOSAL
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



Kota Bandung dan Upaya *Pencapaian Sustainable Development Goals*
(SDG's)
(Studi Harmonisasi Pembangunan Global, Nasional dan Lokal)

TIM PENGUSUL

Ketua	Iwan Ridwan Zaelani, S.IP, M.Si	NIDN: 0307067802
Anggota	Dr. M. Budiana, S.IP, M.Si	NIDN: 0402047002
	Drs. Sigid Harimurti, M.Ipol	NIDN: 0405025901

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian : Kota Bandung dalam Upaya *Pencapaian Sustainable Development Goals* (SDG's): Studi Harmonisasi Pembangunan Global, Nasional dan Lokal

Bidang Unggulan PT : Peranan Organisasi Internasional dalam hubungan internasional

Topik Unggulan : Ekonomi Politik Internasional

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Iwan Ridwan Zaelani, S.IP, M. Si

b. NIDN : 0307067802

c. Jabatan Fungsional : Tenaga Pendidik

d. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

e. Nomor HP : 081220200078

f. Alamat surel (e-mail) : iwanrz@unpas.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. M. Budiana, S.IP, M.Si

b. NIDN : 0402047002

c. Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Drs. Sigid Harimurti, M.Ipol

b. NIDN : 0405025901

c. Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Lama Penelitian Keseluruhan : 6 Bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 10.000.000

Biaya Luaran Tambahan : -

Bandung, 15 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ketua Peneliti,

Alif Oktavian, S.IP, MH
NIDN. 0411106701

Iwan Ridwan Zaelani, S.IP, M.Si
NIDN. 0307067802

Menyetujui,
Dekan FISIP Unpas

Ketua P3M FISIP Unpas

Dr. M. Budiana, S.IP, M.Si
NIDN. 0402047002

Dr. Abu Huraerah, M.Si
NIDN. 0404026201

RINGKASAN

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) pada tahun 2000, dan 15 tahun kemudian, agenda untuk 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutannya, lembaga politik tertinggi di dunia itu menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai konsep inti dan prinsip utama untuk memandu pembangunan ekonomi, sosial global dan nasional.

Pembangunan berkelanjutan dengan pola SDGs menjadi mandat penting dari masyarakat di seluruh dunia, yang harus dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pembangunan di segala bidang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Implementasi SDGs khususnya bagi Kota Bandung, bukanlah hal yang mudah, hal ini tidak lain karena dalam komitmen SDGs memiliki tujuan yang cukup banyak (17 tujuan, 169 target dan 230 indikator) dengan kompleksitas yang tinggi (dirasakan sangat ambisius). Realitas dan tantangan di Kota Bandung masih banyak, terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Namun demikian, bagaimanapun seluruh “komitmen internasional” tersebut harus diselesaikan pada tahun 2030.

Dengan menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini akan berupaya menjelaskan posisi pemerintah lokal (kota Bandung) dalam komitmen pembangunan global serta upaya praktis pencapaiannya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	ii
RINGKASAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	
1.3. Perumusan Masalah.....	
1.4. Target Penelitian.....	
1.5. Capaian Luaran Penelitian.....	
BAB II RENSTRAS DAN ROAD MAP PENELITIAN PERGURUAN TINGGI	
2.1. Rencana Strategis Penelitian.....	
2.2. Peta Jalan Penelitian.....	
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	
BAB IV METODE PENELITIAN.....	
BAB V JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA	
5.1. Jadwal Kegiatan.....	
5.2. Anggaran biaya.....	
REFERENSI	
LAMPIRAN	

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Kota Bandung dan Upaya *Pencapaian Sustainable Development Goals* (SDG's): Studi Harmonisasi Pembangunan Global, Nasional dan Lokal

2. Tim Peneliti :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Alokasi Waktu
1.	Iwan Ridwan Zaelani, S.IP, M.Si	Ketua	Ekonomi Politik Internasional	-
2.	Dr. M. Budiana, S.IP, M.Si	Anggota	Politik Internasional	-
3.	Drs. Sigid Harimurti, M.Ipol	Anggota	Politik Luar Negeri	-

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Objek penelitian ini menekankan pada sinergisitas dan atau harmonisasi komitmen global pada ruang local (Pemerintah Daerah). Dalam hal ini akan mencakup kondisi lingkungan strategis, peluang, dan tantangan yang dihadapi kota Bandung pada upaya pencapaian SDGs yang meliputi dasar hukum, kelembagaan, pendanaan, pelaksanaan dan *monitoring* serta evaluasi.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Desember 2020

Berakhir : Mei 2021

5. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan):

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bandung

6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya):

Bappeda Kota Bandung

7. Temuan yang ditargetkan:

Penelitian ini ditargetkan dapat menjadi sebuah "*policy paper*" yang diantaranya dimaksudkan sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan dan para pihak baik swasta maupun lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam program dan pelaksanaan SDGs. Adapun tujuan dari Policy Paper ini adalah memberi arah bagi pengembangan dan kemajuan program SDGs kota Bandung sebagai bagian dari dukungan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional dan dalam rangka pencapaian SDGs itu sendiri.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:

Hubungan internasional, yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat sipil dan individu, akan memberikan pengaruhnya, baik langsung maupun tidak langsung, kepada dinamika pembangunan di suatu masyarakat. Sebaliknya, persoalan-persoalan pembangunan yang berkembang dalam suatu masyarakat atau negara akan berpengaruh dalam wacana Hubungan Internasional, ketika isu-isu pembangunan tersebut terangkat dari semata-mata persoalan nasional menjadi persoalan internasional atau global. Dengan kata lain Hubungan Internasional memberikan *material case* bagi studi

pembangunan.

9. Kontribusi pada pencapaian renstra perguruan tinggi Anda:
Peranan Organisasi Internasional dalam hubungan internasional
Disiplin Ilmu Hubungan Internasional merupakan salah satu bidang ilmu yang bergerak sangat dinamis, bersifat inklusif (*inclusive*) dan bersifat *globally focused discipline*. Keterkaitan studi Hubungan Internasional dengan isu-isu pembangunan menjadi sesuatu yang natural, ketika isu-isu pembangunan dilihat dan ditangani bukan hanya dalam konteks nasional, tetapi juga internasional.
Namun demikian harus dicatat bahwa isu pembangunan, termasuk kemiskinan, adalah isu yang relatif baru dalam wacana Ilmu Hubungan Internasional, dibandingkan dengan wacana-wacana seperti keamanan, perdamaian, perdagangan, dan keuangan internasional. Dan secara teoritis, hal ini tidak terlepas pada peran Organisasi Internasional.
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran:
 - *Global: Jurnal Politik Internasional*; (S2)
 - *INTERMESTIC: Journal of International Studies* (S2)Tahun rencana publikasi: Mei 2020
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa sosial atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya
-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) pada tahun 2000, dan 15 tahun kemudian, agenda untuk 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutannya, lembaga politik tertinggi di dunia itu menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai konsep inti dan prinsip utama untuk memandu pembangunan ekonomi, sosial global dan nasional.

Pada dasarnya, ide SDGs merupakan pengembangan dari MDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030 dengan tantangan selain berorientasi pada hasil yang terukur secara kuantitatif juga berorientasi pada kualitas. Pembangunan berkelanjutan adalah proses yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.

Pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga tiang utama yang saling terintegrasi, yaitu ekonomi (keberlanjutan ekonomi), sosial (keberlanjutan sosial) dan lingkungan (kelestarian lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.

Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Di dalam Tujuan pembangunan berkelanjutan seluruh negara di dunia terdapat (17 tujuan, 169 target dan 230 indikator) Pilar 1 -6 yang tercakup dalam

17 pilar adalah agenda inti yang merupakan lanjutan dari MDGs, sedangkan pilar ke- 7-17 adalah landasan baru, yaitu:

- 1) Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
- 2) Tanpa kelaparan, tidak ada lagi kelaparan,
- 3) mencapai ketahanan pangan, serta mendorong budidaya pertanian berkelanjutan; Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- 4) Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
- 5) Kesetaraan gender;
- 6) Air bersih dan sanitasi;
- 7) Energi bersih dan terjangkau,
- 8) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur;
- 10) Mengurangi kesenjangan;
- 11) Keberlanjutan kota dan komunitas;
- 12) Konsumsi dan produksi bertanggung jawab;
- 13) Aksi terhadap iklim, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Kehidupan bawah laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan;
- 15) Kehidupan di darat, melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah;
- 16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian;
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pembangunan berkelanjutan dengan pola SDGs menjadi mandat penting dari masyarakat di seluruh dunia, yang harus dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pembangunan di segala bidang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Dengan demikian menjadi suatu keniscayaan bagi Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan kota Bandung sebagai Ibu kota provinsi, untuk mengimplementasikan SDGs.

1.2. Identifikasi Masalah

Pembangunan berkelanjutan dengan pola SDGs menjadi mandat penting dari masyarakat di seluruh dunia, yang harus dilaksanakan melalui berbagai aktivitas pembangunan di segala bidang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Implementasi SDGs bagi Kota Bandung, bukanlah hal yang mudah, hal ini tidak lain karena dalam komitmen SDGs memiliki tujuan yang cukup banyak (17 tujuan, 169 target dan 230 indikator) dengan kompleksitas yang tinggi (dirasakan sangat ambisius).*

Realitas dan tantangan di Kota Bandung masih banyak, terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Namun demikian, bagaimanapun seluruh “komitmen internasional” tersebut harus diselesaikan pada tahun 2030.

1.3. Perumusan Masalah

- 1) Apa Peran yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)?
- 2) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2030?

1.4. Target Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga internasional terkait tentang tantangan, hambatan dan solusi-solusi apa yang harus dipilih dalam upaya Pencapaian SDGs di Kota Bandung.

1.5. Capaian Luaran Penelitian

Dengan menerbitkan hasil penelitian ini dalam bentuk buku dan artikel di jurnal nasional diharapkan penelitian ini akan berkontribusi terhadap pemahaman publik tentang upaya pencapaian SDGs. Global: Jurnal Politik Internasional dan atau INTERMESTIC: Journal of International Studies.

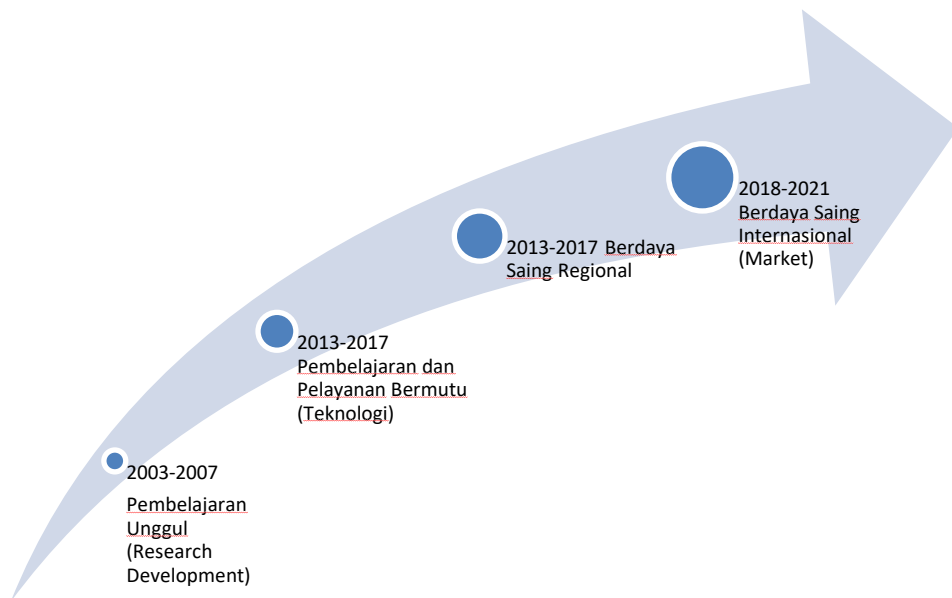
Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS1	TS+1	TS+2
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal ²⁾	Internasional bereputasi					
		Nasional Terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding ³⁾	Internasional Terindeks					
		Nasional					
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah ⁴⁾	Internasional					
		Nasional					
4	<i>Visiting Lecturer</i> ⁵⁾	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ⁶⁾	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak Cipta					
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain Produk Industri					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna ⁷⁾						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial ⁸⁾						
8	Buku Ajar (ISBN) ⁹⁾						
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) ¹⁰⁾						

BAB II

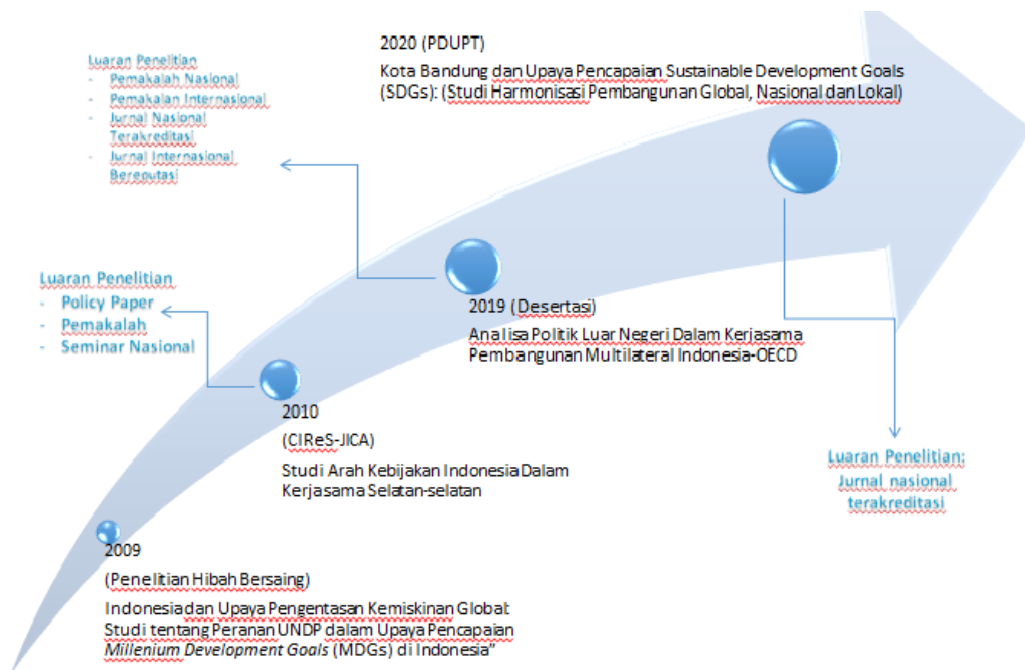
RENSTRA DAN ROAD MAP PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

2.1 Rencana Strategis Penelitian



Sumber: Rencana Induk Penelitian Unpas

2.2 Road Map Penelitian



BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Tinjauan Pustaka

Tabel. 3.1

Intisari Tinjauan Kepustakaan

No.	Sumber	Rangkuman Hasil Penelitian
1.	(Pratama & Purnomo, 2020)	
2.	(Aisyah et al., 2020)	Kajian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan yang merupakan salah satu pilar dalam program SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>) 2030 dimana pemerintah lokal ditempatkan sebagai aktor utama. Untuk di level regional ASEAN, komitmen negara kawasan untuk pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan tergambar di dalam Blueprint ASEAN Socio-Culture Community 2025. Kajian terhadap aspek implementasi clear political objectives berkomitmen secara penuh dalam praktek city diplomacy untuk melibatkan diri secara langsung meskipun dalam gerak terbatas pada kerjasama internasional melalui kebijakan dan komunikasi yang berimbang antar lembaga pemerintahan dan AUS AID (sebagai donor internasional). Pemerintah kota tidak lagi dipandang sebagai objek implementasi rencana program yang dirumuskan pada tingkat pusat, namun juga berpeluang untuk merumuskan rencana strategis atau <i>bottom up</i> prosedur yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal dan kesesuaian model dengan pembangunan kota berkelanjutan ramah lingkungan.
	(Bali Swain & Yang-Wallentin, 2020)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ambisius telah dikritik karena bersifat universal, dibingkai secara luas, tidak konsisten dan sulit untuk diukur, diterapkan, dan dipantau. Kami berkontribusi dengan mengukur dan memprioritaskan SDGs dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan model persamaan struktural (SEM) untuk menyelidiki, pilar yang mendasari

		SDGs (ekonomi, sosial dan lingkungan) mana yang paling efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa negara maju mendapatkan keuntungan paling besar dengan berfokus pada faktor sosial dan lingkungan, sedangkan negara berkembang mendapatkan keuntungan paling besar dengan tetap fokus pada faktor ekonomi dan sosial.
	(Ngai, 2020)	Dalam wacana lingkungan, keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan adalah kata kunci. Dalam praktiknya, tujuan ini didukung secara luas oleh lembaga internasional, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah lokal. Sementara wacana global tentang keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan beroperasi sebagai sumber pengaruh yang kuat di seluruh dunia, kami memiliki akses ke beberapa studi yang secara khusus meneliti bagaimana praktisi pembangunan di Dunia Selatan menafsirkan dan menerapkan konsep-konsep ini. Untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian komunikasi lingkungan, studi kasus yang dilaporkan dalam artikel ini menyelidiki bagaimana LSM lokal di pedesaan Kamboja menafsirkan dan menerapkan istilah "keberlanjutan" dan "pembangunan berkelanjutan". Meneliti interpretasi LSM lokal mempromosikan wawasan yang berbeda tentang berbagai masalah pembangunan, mengurangi ketidakjelasan kata kunci, dan menjelaskan kesenjangan dalam wacana global. Analisis wacana kritis yang diterapkan mengungkapkan nilai dari melakukan penyelidikan lokal tambahan dalam berbagai konteks pembangunan yang selanjutnya akan menginformasikan dialog tentang keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan dengan memasukkan perspektif lokal yang lebih luas.
	(Mutiarani & Siswantoro, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili rencana aksi global, yang disetujui oleh para pemimpin dunia, dimaksudkan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang dijadwalkan

		<p>akan tercapai pada tahun 2030. Indonesia mulai melaksanakan SDGs tersebut pada tahun 2015. Studi ini melibatkan 34 provinsi sebagai sampel dengan periode observasi 2015-2016. Analisis regresi berganda digunakan di sini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan penilaian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di provinsi yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini merepresentasikan karakteristik pemerintah daerah dalam hal luas wilayah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan keberadaan pendapatan asli daerah sehingga berdampak pada pencapaian SDGs. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah membutuhkan tenaga dan sumber daya yang besar untuk memenuhi SDGs. Ini harus didukung oleh pemimpin pemerintah daerah yang kuat dan infrastruktur serta sistem yang baik.</p>
	<p>(van Zanten & van Tulder, 2020)</p>	<p>Keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bergantung pada penyelesaian tantangan 'nexus': bagaimana interaksi positif antara SDG dapat dioptimalkan, dan interaksi negatif diminimalkan, untuk menciptakan manfaat tambahan dan mengurangi trade-off? Karena berbagai dampaknya pada SDGs, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi menjadi pendorong utama untuk menjalankan hubungan SDG ini. Namun interaksi antara aktivitas ekonomi individu dan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan belum dinilai secara sistematis, sehingga menciptakan hambatan operasional yang penting untuk mencapai SDGs. Makalah ini melakukan tinjauan sistematis terhadap 876 artikel yang diterbitkan antara 2005 dan 2019 untuk mempelajari hubungan antara kegiatan ekonomi individu, pembangunan berkelanjutan secara umum, dan SDGs secara khusus. Ia menemukan bahwa studi tentang pertanian, industri, dan kegiatan manufaktur sebagian besar melaporkan dampak negatif pada pembangunan lingkungan, sementara literatur tentang kegiatan jasa menyoroti kontribusi ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi diharapkan berdampak positif pada industrialisasi, infrastruktur, dan inovasi [SDG 9], produktivitas ekonomi [SDG 8], perumahan dan</p>

		transportasi [SDG 11], energi [SDG 7], dan pengelolaan limbah [SDG 6]. Namun, dampak negatif tersebar luas, mempengaruhi ekosistem [SDG 14 dan 15], perubahan iklim [SDG 13] dan kesehatan manusia [SDG 3]. Kami memadukan interaksi positif dan negatif antara aktivitas ekonomi individu dan target SDG dan membahas implikasi untuk: pendekatan tata kelola terintegrasi (nexus) terhadap SDG; peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan berkelanjutan; dan untuk meningkatkan klasifikasi statistik untuk memantau dampak SDG kegiatan ekonomi.
	(Schwan, 2019)	
	(Rodriguez-Anton et al., 2019)	
	(Ferawati, 2018)	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Indonesia untuk mencapai Sustainable Development Goals. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, Dana Pihak Ketiga dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan kemiskinan. Regresi Panel Provinsi di Indonesia dan untuk melihat wilayah yang mampu mencapai SDGs dilakukan pemetaan dengan Diagram Cartesius. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (DPK) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan secara bersama-sama, namun secara parsial IKLH tidak berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Wilayah yang memiliki peluang mewujudkan SDGs yaitu Jawa Tengah, karena wilayah ini memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dengan IKLH yang juga tinggi.
	(Yusuf et al., 2018)	
	(D'Alessandro & Zulu, 2017)	Dengan terbitan khusus ini, African Geographical Review bertujuan untuk menawarkan perspektif geografis yang beraneka segi tentang pembangunan Afrika dalam agenda pembangunan global pasca-2015. Proyek ini lahir dari keyakinan bahwa geografi manusia adalah disiplin terapan yang memiliki wawasan mendasar untuk ditawarkan pada debat global dan untuk mencari solusi inovatif untuk memajukan agenda

		<p>pembangunan global setelah 2015, dengan fokus khusus pada Afrika, tantangan dan potensinya. . Lebih jauh, geografi manusia, dan lebih khusus geografi politik dan ekonomi, menawarkan pemahaman teoritis dan metodologis yang tak ternilai untuk menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan dan keberlanjutan dan dalam mencari solusi yang langgeng sebagai inti dari agenda pembangunan global. Wawasan geografis ini sangat penting bagi Afrika, sebuah benua yang unik dalam tantangan dan peluang pembangunannya dibandingkan dengan kawasan berkembang lainnya di dunia. Pada saat yang sama, Afrika kaya akan variasi geografis internal (antar dan dalam negara) (sosiokultural, ekonomi, politik dan kelembagaan, ekologi, dan sejarah). Afrika, oleh karena itu, membutuhkan nuansa spesifik konteks dalam menganalisis masalahnya untuk sampai pada rangkaian solusi yang sesuai konteks secara umum, dan terutama ketika komunitas global bertransisi dari implementasi Tujuan Pembangunan Milenium dan agenda pasca-2015 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.</p>
	(Kurniawati, 2017)	<p>Dalam kajian perubahan kebijakan, setidaknya ada dua metode utama yang digunakan, yaitu pendekatan domestik dan internasional. Klasifikasi pendekatan tidak hanya didasarkan pada siapa aktor yang terlibat dalam proses perubahan kebijakan atau dari mana sumber pengaruh itu berasal, tetapi yang lebih mendasar setiap pendekatan menekankan pada arena politik yang berbeda. Pendekatan domestik yang dominan dalam kajian ilmu politik dan administrasi kebijakan publik menjelaskan perubahan kebijakan sebagai arena aktor domestik dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri. Sedangkan pendekatan internasional yang dikembangkan dalam kajian hubungan internasional mengawasi perubahan kebijakan sebagai arena pencapaian kepentingan aktor internasional maupun transnasional yang menginginkan perubahan kebijakan baik dengan menekan perubahan maupun memberikan preferensi yang dapat dipilih secara sukarela oleh pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji metodologi</p>

		<p>dari dua pendekatan yang telah ada sebelumnya dan mencoba memperkenalkan pendekatan alternatif yang disebut intermestik (domestik internasional). Pendekatan intermestik berguna untuk menganalisis perubahan kebijakan di era globalisasi yang terjadi seolah-olah dunia “borderless”. Pendekatan ini dimulai dengan penjelasan bahwa kategori domestik dan internasional sudah tidak relevan lagi. Dengan kata lain, pendekatan intermestik menekankan satu kesalahan fatal yang kami lakukan justru pada pemilihan arena domestik dan internasional dalam proses perubahan kebijakan karena dunia sedang menuju ke “satu ruang atau arena politik global”. Namun dalam pendekatan intermestik gagasan tentang kedaulatan negara merupakan aspek yang penting dan pemerintah tetap memiliki peran utama dalam proses perubahan kebijakan disamping pengaruh aktor lain. Namun demikian, peran negara menjadi ambigu karena proses globalisasi telah meredefinisikan hak kedaulatan dan kekuatan politik negara bangsa..</p>
	(Zhu, 2017)	<p>Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) global untuk 15 tahun mendatang (2016-2030), pembangunan berkelanjutan selanjutnya akan menjadi konsep inti dan prinsip utama untuk memandu pembangunan ekonomi dan sosial global dan nasional. Berdasarkan latar belakang ini, memperkuat penelitian integratif tentang teori dan metodologi pembangunan berkelanjutan telah menjadi misi penting yang strategis. Artikel ini memberikan kerangka kerja analitik untuk ilmu keberlanjutan, yang diberi nama kerangka kerja objek-subjek-proses (OSP) untuk memeriksa masalah-masalah utama yang dihadapi selama penelitian teoritis dan analisis kebijakan. Kajian ini menekankan bahwa pada dimensi objek, pembangunan berkelanjutan berarti mengupayakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam batas-batas biofisik bumi dan hubungan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi harus mengandung dan melengkapi, bukan paralel dan substitusi; pada dimensi proses, pembangunan berkelanjutan harus mengadopsi baik strategi responsif dan proaktif untuk keseluruhan manajemen proses yang</p>

		menggunakan model pressure-state-response (PRS) daripada berurusan dengan satu bagian dari mereka; Pada dimensi subjek, penelitian pembangunan berkelanjutan harus melibatkan pemangku kepentingan utama yang merupakan jenis tata kelola yang saling berkolaborasi daripada saling terpisah. Dari perspektif ilmu keberlanjutan, ekonomi hijau digunakan sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi masalah objek, proses dan subjek serta pentingnya ekonomi hijau dibahas dalam penelitian ini..
	(Theron, 2016)	
	(Karmasin & Lestari H., 2015)	

3.2. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berdasarkan uraian kajian terdahulu diatas, penelitian ini dipandang signifikan karena beberapa alasan:

- 1) Upaya pencapaian pembangunan dalam kerangka SDGs belum cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan mempublikasikan hasil penelitian ini (dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah/jurnal) penelitian ini diharapkan secara signifikan dapat memberikan kontrobusi untuk menyebarluaskan pemahaman tentang masalah-masalah terkait.
- 2) Penelitian ini dapat dikatakan merupakan penelitian yang belum banyak dilakukan di Indonesia yang memanfaatkan kontribusi perspektif Ilmu Hubungan Internasional dalam melihat persoalan pembangunan dalam kerangka global, dengan memperhatikan hubungan antar komitmen global dengan komitmen lokal dalam operasionalisasi program-program pencapaian tujuan SDGs di Indonesia.
- 3) Penelitian SDGs dalam kerangka perspektif ekonomi pembangunan, sosiologi, antropologi dan sebagainya telah banyak dilakukan, namun penelitian tentang pembangunan dalam kerangka global yang berkait dengan program pembangunan nasional, dengan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini, masih sangat sedikit dilakukan, khususnya dalam perspektif akademik.

- 4) Hasil penelitian ini tidak hanya dapat diletakkan dalam kerangka informatif dan pengembangan wacana keilmuan, tetapi juga diharapkan akan melahirkan input-input kebijakan yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat sipil di Indonesia yang bergerak dalam program pembangunan.

3.2. Kerangka Konseptual

3.2.1. Intermestic Approach

Pendekatan intermestik berguna untuk menganalisis perubahan kebijakan di era globalisasi yang terjadi seolah-olah dunia “borderless”. Pemilihan arena domestik dan internasional dalam proses perubahan kebijakan dunia yang sedang menuju “satu ruang atau arena politik global”.

3.2.2. Konsep Pembangunan (*development*) dalam Hubungan Internasional

Penganut teori-teori modernisasi akan melihat ‘pembangunan’ sebagai proses transisi antara masyarakat yang tradisional menuju masyarakat modern (Abrahamsen, 2000; Escobar, 1995: 6). Untuk menjadikan masyarakat modern, tolak ukur yang digunakan adalah perubahan masyarakat dengan tolak ukur pertumbuhan ekonomi. (Abrahamsen, 2000: 26).

3.3.3. Teori Rezim dan Organisasi Internasional

Pencapaian pembangunan sebuah negara, seringkali dilakukan dengan memperkuat tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara, tetapi juga dengan organisasi internasional, organisasi internasional non pemerintah, serta bentuk kerjasama lainnya, karena kerjasama tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam menciptakan jaringan dan kolaborasi suatu negara. (Dai et al., 2017; Hennida, 2015; Klingebiel, 2014)

Stephen Krasner (1982 :186) mendefinisikan rezim internasional sebagai "prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor bertemu di area isu tertentu."

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Pokok permasalahan penelitian bersifat dinamis dan kompleks, sehingga proses penelitian bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berguna untuk masa depan.

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam (*in depth interview*) tak berstruktur dengan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dan pengamatan atau observasi (*participant observation*).

BAB V
JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA

5.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	2020				2001														
	Des				Jan			Feb			Mar			April			Mei		
Persiapan																			
Penyusunan Proposal																			
Review Proposal																			
Revisi Proposal																			
Penelitian																			
Penulisan Hasil																			
Laporan																			
Publikasi																			

5.2. Biaya Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. M., Supli, N. A., & Tarigan, A. H. Z. (2020). Peran Strategis City Diplomacy Pemerintah Palembang Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan Ramah Lingkungan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 5(1), 125. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i1.4277>
- Bali Swain, R., & Yang-Wallentin, F. (2020). Achieving sustainable development goals: predicaments and strategies. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 27(2), 96–106. <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316>
- D'Alessandro, C., & Zulu, L. C. (2017). From the Millennium Development Goals (MDGs) to the Sustainable Development Goals (SDGs): Africa in the post-2015 development Agenda. A geographical perspective. *African Geographical Review*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/19376812.2016.1253490>
- Ferawati, R. (2018). Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kontekstualita*, 33(02), 143. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>
- Karmasin, & Lestari H., T. (2015). PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs). *Jurnal Ilmiah*, 17–32.
- Kurniawati, D. E. (2017). Interestic Approach: A Methodological Alternative in Studying Policy Change. *PCD Journal*, 5(1), 147. <https://doi.org/10.22146/pcd.26293>
- Mutiarani, N. D., & Siswanto, D. (2020). The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs). *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1847751>
- Ngai, P. B. yuen. (2020). Local Interpretation of the Global Discourse of Sustainability and Sustainable Development in Rural Cambodia. *Environmental Communication*, 14(8), 1079–1096. <https://doi.org/10.1080/17524032.2020.1768426>
- Pratama, N. B., & Purnomo, E. P. (2020). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta* Info artikel. 6(2), 64–74.
- Rodriguez-Anton, J. M., Rubio-Andrada, L., Celemín-Pedroche, M. S., & Alonso-Almeida, M. D. M. (2019). Analysis of the relations between circular economy and sustainable development goals. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 26(8), 708–720. <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1666754>
- Schwan, G. (2019). Sustainable development goals. *Gaia*, 28(2), 73. <https://doi.org/10.14512/gaia.28.2.1>
- Theron, G. B. (2016). Sustainable development goals. *Obstetrics and Gynaecology Forum*, 26(1), 1. <https://doi.org/10.7312/sach17314-016>
- van Zanten, J. A., & van Tulder, R. (2020). Towards nexus-based governance: defining interactions between economic activities and Sustainable

Development Goals (SDGs). *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 00(00), 1–17.
<https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1768452>

Yusuf, A. A., Komarulzaman, A., Alisjahbana, A. S., Anna, Z., Ghina, A. A., Setiawan, A., & Megananda. (2018). *Kesiapan Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat*.

Zhu, D. (2017). Research from global Sustainable Development Goals (SDGs) to sustainability science based on the object-subject-process framework. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 15(1), 8–20.
<https://doi.org/10.1080/10042857.2017.1286147>